

MEMPOSISIKAN KEMBALI KUASA PEREMPUAN DALAM PERDAMAIAN HUBUNGAN ANTARAGAMA (Kasus di Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta)

Drs. Siantari Rihartono, M.Si

(Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

ABSTRACT

At issue is that it involves the issue of women, may be one solution, which has barely taken into account in each of the steps in building peace among religious believers . Conflict is always synonymous with the male role, so it must be dealt with men . Whereas in some political facts it appears that women are behind men, often have a very central position in decision-making by men.

This study examines three key issues, namely the portrait of life among religious women, women's strategies to prevent and keep the peace, and how the power of women in peace building creates. Such a study is important , because during the public often view a woman's face as the face of oppression.

This is a qualitative study, using observation and participation, also conducted in-depth interviews with several groups. Direct involvement of the researcher in the study site, is able to determine the key informants (key informants) to be involved in in-depth interviews to issues the position of women in family, social, and culture in the context of their ability to make efforts for peace.

From the research result , that the activities of women over the cultural nature, it becomes a crutch and a major force in the process of creating and maintaining peace among religious believers, so that they can become the main pillar of the movements of the peace and harmony of creation which was pioneered by men .

Keywords : Women, Power , Inter-Faith , Peace, and Harmony

A. Latar Belakang Masalah

Riset ini berangkat bukan dari sebuah fenomena besar, yang umumnya menjadi titik tolak persoalan. Berawal dari sebuah pengalaman yang ada di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Selama konflik

Ambon berlangsung, Desa Wayame sama sekali tidak tersentuh konflik. Padahal desa ini berada di tengah-tengah konflik berlangsung. Tetapi desa ini jarang dilihat orang, pengamat, dan peneliti konflik. Di Yogyakarta terdapat satu ruang yang mirip dengan Wayame di

Ambon, yakni Kelurahan Klitren. Di daerah ini terdapat GKJ Gondokusuman cukup besar dan Universitas Kristen Duta Wacana. Umat muslim hidup berdampingan sangat erat dengan umat Kristiani, dan bahkan beberapa di antaranya menerima mahasiswa Kristen untuk kost.

Dalam kaitannya dengan konflik—baik itu berlatarbelakang etnik, agama, ekonomi, ataupun konflik sosial lainnya—kendali konflik selalu identik dengan peran laki-laki yang dominan, sehingga laki-laki memegang kontrol atas arah dan resolusi dimana konflik itu akan diarahkan. Padahal dalam beberapa fakta politik tampak bahwa perempuan yang berada di balik laki-laki, seringkali memiliki posisi yang sangat sentral dalam pengambilan keputusan oleh laki-laki. Melibatkan isu perempuan dalam konflik, selama ini nyaris tidak diperhitungkan dalam setiap langkah-langkah dalam membangun perdamaian, terutama dalam kasus konflik antarumat beragama.

Dalam pandangan kaum feminis pada umumnya, secara kultural tidak ada ruang bagi kesejajaran antara laki-laki dan wanita. Sebaliknya, kultur Barat modern, sekalipun masih mendapat protes kaum feminis di berbagai tempat, dianggap jauh lebih toleran dan memberi posisi yang lebih baik bagi perempuan. Akan tetapi, jika kita melihat dalam realitas kekuasaan wanita Melayu (Asia Tenggara) secara lebih jeli, kekuasaan dapat hadir dari ketidakberdayaan dan ketertindasan. *Kedua*, meskipun berada di belakang layar perempuan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penentuan kebijakan suaminya termasuk didalamnya kebijakan publik. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dan pembangunan taman di Candi Prambanan Yogyakarta, merupakan bukti sejarah bagaimana andil perempuan dalam mempengaruhi kebijakan laki-laki. Masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang menjelaskan bahwa istri pejabat mempunyai kemampuan dan peran penting dalam menentukan kebijakan publik, walau melalui alur

nonpublik. Namun demikian, peran wanita ini nyaris tidak pernah tersentuh oleh konstruksi ilmiah yang di import dari Barat untuk memotret politik Asia (Sullivan, 1991:60).

Netralitas itulah yang agaknya menjadi peluang perempuan untuk dapat lebih didorong untuk berperan dalam menjaga perdamaian. Akan tetapi studi dan kebijakan-kebijakan yang menempatkan perempuan dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia hampir tidak didapat. Bisa jadi hal itu karena tiga hal. Pertama, konflik adalah milik laki-laki, sehingga hanya merekalah yang memulai dan dapat mengakhirinya. Kedua, subordinasi perempuan oleh laki-laki diduga merupakan indikasi penting mengapa perempuan dianggap tidak memiliki akses terhadap perdamaian. Subordinasi ini tidak hanya mengakibatkan suara perempuan tidak didengar, tetapi juga menjadi terbentuknya konstruksi sosial bahwa perempuan adalah makhluk lemah. Ketiga, pemerintah sebagai mediator utama berperan penting terhadap marginalisasi perempuan dalam kehidupan antarumat beragama. Ini berkaitan dengan lemahnya posisi perempuan dalam pemerintahan, baik di lembaga legeslatif maupun eksekutif. Oleh sebab itu, riset ini akan menggali potret perempuan di wilayah penelitian, dan kemudian membangun model kuasa perempuan untuk dapat berperan sebagai mediator perdamaian.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana inti persoalan penelitian, maka rumusan masalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana posisi perempuan dalam kehidupan antarumat beragama di Kelurahan Klitren-Yogyakarta?
- b. Bagaimana kuasa perempuan dalam membangun dan menciptakan kedamaian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk me-

mahami posisi dan kuasa perempuan dalam menciptakan perdamaian untuk kehidupan antarumat beragama. Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya dengan penelitian ini dapat digunakan untuk membangun model perdamaian antarumat beragama melalui potensi yang dimiliki perempuan.

D. Tinjauan Pustaka

Usman (1998) menemukan pola kesetaraan dalam masyarakat Jawa, yang cenderung menempatkan pola kedudukan setiap anggota keluarga (suami atau istri) dalam posisi yang kurang lebih seimbang. Gejala yang disebut gejala matrifokalitas ini pada masyarakat Jawa terlihat dengan adanya pandangan kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam sistem peran social secara umum. Kedudukan serta peran seorang ibu dianggap penting dalam masyarakat Jawa karena kaum ibu tidak hanya mengasuh dan mendidik anak serta mendampingi suami, tetapi juga diperkenankan untuk keluar rumah melakukan kegiatan ekonomi (Geertz, 1983). Disini kita melihat pendapat Engels bahwa wanita hanya bisa melepaskan diri dari kekuasaan patriarhal apabila berperan secara ekonomi mendapat kebenarannya. Jika peranan wanita dalam ekonomi keluarga jauh lebih berarti dibandingkan suami maka wanita akan mempunyai kekuasaan, pengaruh, kekuatan, posisi tawar yang baik, serta kebebasan yang sama dengan suaminya. Meski agak berbeda, Koentjoroningrat juga memberi focus pada peranan istri dalam manajemen anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga, sehingga dalam hal ini wanita setara dengan suami (Sullivan, 1991). Dalam situasi macam itulah, dengan ibu, dengan ibu sebagai pusat keluarga, muncul gejala matrifokalitas, yaitu dominasi wanita melalui jaringan yang terjadi dalam keluarga inti dan antarkeluarga inti yang terbentuk dan terpelihara oleh wanita; wanita lebih berkuasa dan lebih dominant dalam urusan rumah-tangga, sedangkan laki-laki tidak berfungsi.

Sebagaimana Koentjoroningrat, Geertz

juga mengungkapkan bahwa dominasi wanita Jawa terjadi dalam urusan domestic. Akan tetapi, bagi Geertz (1983), efek dominasi wanita tersebut dapat meluas ke dalam masyarakat menjadi "jaringan dominasi wanita". Wanita menghubungkan kekuasaannya dengan wanita lain atau dengan orang lain yang berhubungan dengannya sehingga jaringan itu begitu kuat dan dominasi wanita meluas hingga suatu bentuk kekuasaan yang nyata. Dalam konteks ini, Rogers menambahkan bahwa dominasi laki-laki pada akhirnya hanya berhenti pada ideology, yang ketika dihadapkan dengan kenyataan maka hal ini menjadi mitos, sedangkan dominasi wanita adalah dominasi nyata praktis yang lebih memperlihatkan kuasa yang hidup. Lombart (1990) juga mengungkapkan bahwa para ibu di Indonesia, yakni kaum wanita, jelas memegang peranan penting yang sangat menonjol, bahkan kedudukannya jauh lebih tinggi daripada wanita pada masyarakat Asia lainnya. Kekuasaan mereka, sekalipun dari belakang layer, tetap ampuh dan bersumber pokok pada kelompok perkumpulan mereka (Lombart, 1990: 92-95).

Jika Geertz dan Koentjoroningrat mengklaim bahwa posisi perempuan dalam wilayah domestik sangat kuat dan secara ekonomi memberikan kontribusi berharga, maka White dan Hastuti menyatakan bahwa kekuatan tersembunyi perempuan pada alam domestik secara struktural telah tersubordinasi akibat terdesaknya mereka ke dalam pembuatan-pembuatan keputusan tentang ideologi samaidengan dunia praktis yang oleh laki-laki dijadikan dominasi publik (Sullivan, 1991: 78). Namun demikian, dalam situasi semacam ini, wanita dapat mencari celah untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, dengan cara yang justru memanfaatkan feminitasnya. Meskipun secara struktur formal mereka tidak berpengaruh, secara informal pengaruh tersebut sangat besar.

F. Landasan Teori

Dalam beberapa tahun ini Indonesia selalu berhadapan dengan persoalan yang sama, yang terjadi secara berulang dan meluas. Pertikaian orang Madura dengan penduduk lokal, misalnya, telah terjadi berulang kali di Kalbar sejak tahun 1962 (Kompas, 20/12/2000; Sudjono, 2000; Alqadrie, 1999; Koeswinarno, 2004). Peristiwa yang terjadi di Kalimantan Tengah pada bulan Februari 2001 semakin menegaskan pula betapa rumitnya persoalan etnis di Indonesia. Konflik etnis semacam ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Konflik antara orang Aceh dengan Batak atau antara Melayu dengan non Melayu di Sumatera Utara, pertikaian di Ambon atau di Papua merupakan gambaran betapa konflik etnis di Indonesia menjadi masalah yang berkepanjangan. Pertikaian di Sulawesi Utara yang melibatkan Gorontalo atau Talaut, konflik agama di Poso, dan di Jawa sendiri yang sarat dengan isu SARA. Serangkaian pertikaian itu merupakan gambaran yang jelas tentang pertikaian etnis yang sedang kita hadapi sekarang ini.

Dengan melihat urian di atas, sebenarnya membangun perdamaian memerlukan pendekatan yang lebih multidimensional. Salah satunya adalah bagaimana menempatkan perempuan dalam membangun model perdamaian berkelanjutan, meskipun mereka sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas sosial laki-laki. Denys Lombard (1990), para ibu jelas memegang peranan penting yang sangat menonjol. Dominasi laki-laki pada akhirnya hanya berhenti pada ideologi. Ketika dihadapkan dengan kenyataan maka dominasi laki-laki ini menjadi mitos. Sebaliknya, dominasi wanita adalah dominasi nyata dan praktis yang lebih memperlihatkan kuasa yang hidup (Sullivan, 1991: 76-77).

Dalam skala yang lebih luas, perempuan sebagai pemegang peranan penting bahkan utama dalam bidang politik bukanlah hal yang baru dalam sejarah kehidupan bangsa ini. Sebagaimana telah diketahui umum, pe-

empuan telah menjadi aktor penting dalam perjuangan kaum nasionalis dalam lingkungan publik yang menandai masuknya bangsa ini ke era modernitas (Boserup, 1970: 9-10). Akan tetapi, peran ini telah secara serius diingkari oleh kaum Asianis laki-laki (peneliti tentang Asia). Demikian juga gelombang tulisan feminis Barat jarang memunculkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan pergerakan politik. Tradisi berpikir ini sangat dipengaruhi oleh tradisi berpikir dunia Barat yang tidak memasukkan ideologi gender, tidak memanipulasi wanita, tetapi juga tidak melibatkannya. Berbagai ideologi dan isme-isme –meskipun berbicara tentang laki-laki dan wanita– tetap memasukkan wacana publik sebagai peran politikus laki-laki saja. Jadi, dunia “publik” adalah dominasi laki-laki, sedangkan dunia “privat” adalah dunia wanita. Pembagian peran privat dan publik di Barat tidak relevan jika diterapkan pada masyarakat Indonesia, karena wanita terbiasa dengan peran privat sekaligus publik. Ada kecenderungan juga bahwa lingkungan domestik dimanipulasi sedemikian rupa oleh penguasa/pemerintah sehingga meskipun sebenarnya berpengaruh besar terhadap dunia publik, ia justru disingkirkan oleh dogma-dogma yang diturunkan publik.

Indonesia merupakan bangsa multi-etnik dan multikultur. Implikasi dari keanekaragaman ini adalah gender harus dipahami dalam konteks budaya tertentu. Gender tidak dapat dipahami secara sederhana hanya dengan membedakan kategori seks, yaitu laki-laki atau wanita. Usman (1998) menemukan pola kesetaraan dalam masyarakat Jawa, yang condong menempatkan pola kedudukan setiap anggota keluarga (suami atau istri) dalam posisi yang kurang lebih seimbang. Gejala yang disebut gejala matrifokalitas ini pada masyarakat Jawa terlihat dengan adanya pandangan kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam sistem peran social secara umum. Kedudukan serta peran seorang ibu dianggap penting dalam masyarakat Jawa karena kaum ibu tidak hanya mengasuh dan mendidik anak serta mendam-

pingi suami, tetapi juga diperkenankan untuk keluar rumah melakukan kegiatan ekonomi (Geertz. 1983).

Sebagaimana Koentjaraningrat, Geertz juga mengungkapkan bahwa dominasi wanita Jawa terjadi dalam urusan domestic. Akan tetapi, bagi Geertz, efek dominasi wanita tersebut dapat meluas ke dalam masyarakat menjadi “jaringan dominasi wanita”. Wanita menghubungkan kekuasaannya dengan wanita lain atau dengan orang lain yang berhubungan dengannya sehingga jaringan itu begitu kuat dan dominasi wanita meluas hingga suatu bentuk kekuasaan yang nyata. Dalam konteks ini, Rogers menambahkan bahwa dominasi laki-laki pada akhirnya hanya berhenti pada ideology, yang ketika dihadapkan dengan kenyataan maka hal ini menjadi mitos, sedangkan dominasi wanita adalah dominasi nyata praktis yang lebih memperlihatkan kuasa yang hidup. Lombart (1990) juga mengungkapkan bahwa para ibu di Indonesia, yakni kaum wanita, jelas memegang peranan penting yang sangat menonjol, bahkan kedudukannya jauh lebih tinggi daripada wanita pada masyarakat Asia lainnya. Kekuasaan mereka, sekalipun dari belakang layer, tetap ampuh dan bersumber pokok pada kelompok perkumpulan mereka (Lombart, 1990: 92-95).

Jika Geertz dan Koentjaraningrat mengklaim bahwa posisi perempuan dalam wilayah domestik sangat kuat dan secara ekonomi memberikan kontribusi berharga, maka White dan Hastuti menyatakan bahwa kekuatan tersembunyi perempuan pada alam domestik

secara struktural telah tersubordinasi akibat terdesaknya mereka ke dalam pembuatan-pembuatan keputusan tentang ideologi sama dengan dunia praktis yang oleh laki-laki dijadikan dominasi publik (Sullivan, 1991: 78). Namun demikian, dalam situasi semacam ini, wanita dapat mencari celah untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, dengan cara yang justru memanfaatkan feminitasnya. Meskipun secara struktur formal mereka tidak berpengaruh, secara informal pengaruh tersebut sangat besar. Dengan melihat asumsi-asumsi tersebut, maka diperlukan dua hal dalam membangun model pemberdayaan perempuan di daerah konflik. *Pertama*, perlakuan untuk menghapus trauma akibat konflik, dengan menyadarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perempuan, baik di sektor publik maupun domestik. *Kedua*, mengamati penggunaan kekuatan yang dimiliki sebagai sebuah strategi kekuasaan perempuan dalam meminimalisir konflik. *Ketiga*, diperlukan sebuah model untuk mensosialisasikan strategi kuasa perempuan sebagai mediator konflik. Sehingga melalui ketiga hal tersebut diharapkan dapat dibangun model peran perempuan di bidang resolusi konflik sosial yang selama satu decade terakhir muncul di Indonesia

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, di samping akan menggunakan observasi partisipasi, juga akan dilakukan wawancara mendalam pada beberapa kelompok sebagai berikut:

No	Jenis	Sumber informasi	Teknik
1	Key informan	<ul style="list-style-type: none"> - Tokoh-tokoh perempuan (formal dan informal) - Pejabat pemerintah tingkat kelurahan 	wawancara mendalam
2	Informan	<ul style="list-style-type: none"> - Para perempuan dan ibu rumah tangga - Tokoh perempuan Pimpinan lokal - Tokoh agama 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara mendalam - Life history

Aspek/variabel	Data	Teknik Pengump. Data
Corak dasar kedudukan perempuan		
1. Peran domestik dan publik perempuan	Peta hubungan laki-laki dan perempuan secara psikologis, sosial, dan kebudayaan	Observasi Wawancara
2. Struktur dan kultur perempuan	Pola kehidupan perempuan	Observasi Wawancara Life history
3. Pembukaan kesempatan peran perempuan	Peta keberadaan terkini perempuan dalam perspektif kebudayaan	Wawancara Observasi
Faktor penentu kedudukan perempuan dalam praktik sosial		
1. Perubahan keseimbangan	Perubahan pola hubungan	Observasi Wawancara
2. Pemaksaan politik laki-laki	Dominasi Kebijakan kelembagaan dan kebudayaan lokal	Observasi Wawancara
3. Melemahnya ikatan tradisional	Pernanan tokoh lokal dan lembaga lokal	Observasi Wawancara Life history

di lokasi penelitian, pada gilirannya akan mampu menentukan informan kunci (*key informan*) untuk kemudian dilibatkan dalam wawancara secara mendalam terhadap persoalan-persoalan posisi perempuan dalam keluarga, social, dan kebudayaan dalam rangka kemampuan mereka melakukan upaya-upaya perdamaian. Tokoh-tokoh perempuan lokal, baik formal maupun informal, pejabat pemerintah lokal, merupakan akses penting untuk mengungkap bagaimana posisi perempuan dan peluang-peluangnya dalam membangun model perdamaian.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta yang secara sosio-antropologis merupakan wilayah yang sangat unik. Di tengah keberadaan GKJ Gondokusuman yang cukup besar dan Universitas Kristen Duta Wacana, masyarakat Muslim hidup secara berdampingan dengan penuh kedamaian.

H. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keberagaman dan Potensi Konflik di Klitren

Pada daerah-daerah yang penduduknya memiliki keragaman baik agama maupun budaya, biasanya rentan dengan konflik, apalagi jika keragaman tersebut kemudian diperparah dengan adanya kesenjangan ekonomi antara satu pihak dengan pihak lain, antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain, atau antara pendatang dengan penduduk pribumi. Para perantau (pendatang) di manapun biasanya lebih ulet dari penduduk setempat. Kalau tidak ulet, mereka akan menjadi pengangguran. (Ecip: 1999; 63). Kesenjangan inilah yang kemudian menjadi titik rawan meletusnya konflik di daerah-daerah yang memiliki keragaman seperti di atas.

Contoh-contoh konflik besar yang terjadi di Indonesia, banyak disebabkan oleh adanya kesenjangan tersebut yang kemudian terbungkus dalam konflik yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Konflik berkepanjangan di Maluku, Poso, Sampit, dan lain-lain, umumnya terjadi karena

latabelakang masalah tersebut. Hanya saja kemudian yang terlihat di permukaan adalah konflik antarsuku atau antaragama. Jika konflik sudah tampak seperti konflik antarsuku atau antar agama, maka persoalannya kemudian sering terjadi berlarut-larut dan sulit untuk dihentikan. Lihat saja betapa panjang dan lamanya kerusuhan di Maluku, Poso, dan Sampit untuk sampai pada titik berhenti (damai) sejak percikan konflik itu dimulai.

Ancaman konflik sosial-budaya semacam ini ada di setiap wilayah yang penduduknya beragam. Wilayah-wilayah urban di sekitar kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Yogyakarta atau wilayah-wilayah pemukiman baru seperti wilayah-wilayah transmigrasi seperti di Poso, Sampit, Sambas, dan lain-lain, adalah wilayah-wilayah yang rawan akan terjadinya konflik.

Dalam ranah ilmu sosial, ada tiga jenis konflik yang seringkali mengintai, yakni konflik primordialisme seperti yang diungkapkan oleh C. Gertz, konflik pertentangan kelas (Karl Marx), dan konflik patron-klien (James Scott). Dari ketiga jenis konflik sosial tersebut, konflik primordialisme Gertz dan konflik pertentangan kelas Marx yang rawan terjadi di Indonesia. Konflik primordialisme rawan terjadi di Indonesia yang memang memiliki keragaman agama, adat dan budaya, sedangkan konflik pertentangan kelas Marx rawan terjadi karena terbentuknya kelas-kelas sosial baru dalam masyarakat Indonesia terutama yang berkaitan dengan status ekonomi, mengingat tingginya kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Tingkat ancaman konflik tidak saja terjadi dalam wilayah-wilayah yang luas, kabupaten-kota atau provinsi misalnya, tetapi juga terjadi di wilayah-wilayah yang lebih kecil, seperti kecamatan atau desa/kelurahan, terutama yang memiliki keragaman tinggi di antara para penduduknya. Potensi konflik akan lebih besar lagi jika dalam wilayah tersebut terdapat dua kubu yang berbeda yang cenderung sama kuat, misalnya saja Islam-Kristen di Poso dan Maluku, atau Madura-Dayak di Sampit.

Ancaman seperti ini juga terjadi di wilayah kecil seperti Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Kelurahan Klitren sejak awal memang menjadi daerah yang beragam. Keberagaman ini bukan hanya dalam hal keberagaman asal daerah para penduduknya, tetapi juga keragaman budaya dan agamanya. Hal ini disebabkan karena Klitren sejak lama telah menjadi wilayah yang banyak dihuni oleh para pendatang yang bekerja dan kemudian menetap di sekitar wilayah Kota Yogyakarta. Potensi konflik yang tersimpan di wilayah ini bukan berasal dari adanya perbedaan kelas atau pertentangan antara penduduk pribumi dengan perantau atau pendatang, tetapi lebih pada adanya perbedaan keyakinan (agama) antara Islam dengan Kristen (dan Katholik) yang dalam hal jumlah terlihat seimbang.

Keadaan ini, sangat disadari oleh para penduduk di kelurahan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Sleman ini. Apalagi di wilayah tersebut terdapat beberapa buah masjid dan gereja, dan diapit oleh dua kampus yang 'berbeda' yakni kampus Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Kedua kampus ini kemudian menyumbang tingginya tingkat keragaman penduduk Klitren, mengingat banyaknya mahasiswa dari kedua kampus yang tinggal (kost) di wilayah Klitren.

2. Kesadaran Warga Klitren

Kesadaran warga Klitren, baik itu para pendatang dan penduduk yang sudah tinggal lebih lama di wilayah itu, sudah ada sejak lama. Menurut Kusnandar, Tokoh Masyarakat yang juga Ketua RW 01, kesadaran akan perlunya gerakan untuk memperkuat kebersamaan di antara warga dan sekaligus mencegah terjadinya konflik sudah mulai muncul sejak tahun 1995.

".....sejak dari saya menetap, sebenarnya masyarakat Klitren sudah plural. Perbandingan antara orang muslim, nasrani, hampir sama.

Klitren juga punya gereja, masjid juga banyak. Dan sejak saat itu, semuanya memang sudah hidup berdampingan. Hanya saja, mulai adanya gerakan-gerakan masyarakat untuk lebih menguatkan ikatan itu bisa dikatakan mulai sekitar tahun 1995 ke atas..."

Masih menurut Kusnandar, sejak awal, memang tidak pernah ada gesekan yang berarti antarpemeluk agama di wilayah Klitren. Bahkan sebaliknya, warga dengan terbuka menerima siapa saja yang datang dan kemudian menetap di wilayah itu. Warga yang memiliki keyakinan berbeda dengan pendatang, tidak pernah mempermasalahkan perbedaan tersebut.

"Saya pribadi sangat welcome dengan pemeluk agama lain, begitu pula agama lain cukup menerima posisi saya. Dalam konteks bermasyarakat kami melakukan kegiatan dengan solid, dan dalam hal keyakinan kami hampir tidak pernah bersinggungan."

Jika ada resistensi atau penolakan kecil, atau juga gesekan kecil, umumnya bukan berdasarkan pada perbedaan keyakinan tersebut, melainkan lebih pada alasan personalnya. Misalnya saja, warga pendatang tersebut sering membuat gaduh atau masalah lain. Penyebabnya lebih pada masalah individu dengan individu lainnya. Hal ini, diungkapkan oleh Yohanes Utoyo, tokoh agama Katholik yang sudah tinggal di Klitren sejak tahun 1978.

"Dulu pernah ada gesekan, tetapi tidak muncul ke permukaan. Maksudnya, tidak menjadi konflik. Paling juga antara individu dengan individu lain. Tidak pernah sampai ada pertengkaran, atau apapun macamnya."

Potensi kemunculan konflik dalam skala yang lebih besar, disadari oleh warga Klitren, baik itu pendatang maupun penduduk asli setempat. Oleh karena itu, ide seperti yang disampaikan oleh Kusnandar tidak hanya berasal dari dirinya, tetapi juga dari tokoh-tokoh

dan masyarakat lainnya.

Sebelumnya, ritual keagamaan berlangsung dalam lingkup intern. Misalnya saja, umat Islam menyelenggarakan Syawalan (halal bil halal) setiap usai bulan Ramadhan, atau pengajian-pengajian dalam skala kecil. Sementara umat Kristen dan Katholik juga menyelenggarakan ritual agamanya masing-masing, misalnya Natal Bersama, atau latihan koor. Setiap kali masing-masing pemeluk agama menyelenggarakan kegiatan keagamaan bersama seperti itu, muncul kekhawatiran dari masing-masing pihak, bahwa kegiatan mereka akan mengganggu ketenangan warga lain yang berbeda agama. Apalagi, umumnya kegiatan bersama seperti itu selalu mengundang keramaian, misalnya memerlukan pengeras suara, atau suara pengajian yang terdengar riuh, begitu pula dengan latihan koor pada warga Katholik.

Keadaan seperti ini menggugah rasa *tepa selira* (tenggang rasa) di antara para pemeluk agama. Mereka menyadari bahwa dalam lingkungan tempat tinggalnya, mereka tidak hidup sendiri, tetapi berdampingan dengan pemeluk agama lain. Hal inilah yang kemudian memperkuat ide-ide untuk memperkuat gerakan-gerakan sosial-keagamaan yang pada dasarnya adalah upaya pencegahan konflik yang kemudian terbukti efektif. Memang tidak semua setuju upaya tersebut dikatakan sebagai upaya pencegahan konflik, karena sebagian besar masyarakat merasa mereka tidak mempunyai konflik dengan pemeluk agama lain di dalam lingkungannya. Masyarakat Klitren lebih suka mengatakan, munculnya gerakan itu adalah sebagai bentuk konkrit dari kegotongroyongan yang tidak tersekat dalam perbedaan agama dan keyakinan. Lebih dari itu, mereka menyadari betapa nikmatnya hidup berdampingan dalam suasana damai dan harmonis. Hal ini diakui oleh Ali, tokoh masyarakat yang juga salah satu Ketua RW 02 Kelurahan Klitren:

"Menurut saya, sangat menarik bisa tinggal di daerah yang 'multireligion' di mana saya diper-

caya untuk menjadi salah satu pemimpin bagi mereka. Karena saya tinggal di sini, jadi apapun yang ada di sini adalah milik kami. Saya harus bisa merawat, menyatukan, menjaga dan mempertahankan kerukunan agama di wilayah yang saya pimpin, agar tercipta kedamaian di setiap hati masyarakat.”

Kesadaran akan keberagaman itu juga memerlukan keadilan bagi semua pemeluk agama di wilayah itu. Keadilan ini adalah bahwa ketika pemeluk salah satu agama mengadakan sebuah kegiatan, maka pemeluk agama lain memiliki hak yang sama untuk melakukannya. Termasuk dalam soal waktu dan penggunaan fasilitas umum. Ali mengaku pernah ditegur oleh pemeluk agama lain ketika ia akan menggunakan Balai RW untuk kegiatan ‘Shalawatan.’

“Ketika persiapan acara dilaksanakan, ada seseorang yang menegur saya karena saya memakai fasilitas warga untuk acara ritual agama kami. Kemudian dia berkata bahwa jika saya tetap akan menggunakan balai pertemuan tersebut, maka agama lain harus boleh melakukan hal serupa. Setelah kejadian itu saya dan masyarakat berkumpul untuk memusyawarahkan fungsi dari balai pertemuan di RW kami yang cukup luas tersebut. Hasilnya, balai pertemuan warga hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat nasioanal atau resmi. Untuk kegiatan yang bersifat keagamaan, harus dilaksanakan di tempat peribadatanannya masing-masing.”

Prinsip keadilan seperti ini juga membangun suasana yang semakin dirasakan kondusif, karena setiap pemeluk agama memiliki hak dan juga kewajiban yang sama akan fasilitas umum. Jika satu pemeluk agama boleh menggunakan fasilitas tersebut, maka pemeluk agama lain juga berhak menggunakannya. Begitu pula sebaliknya, jika fasilitas tersebut dilarang untuk kegiatan agama, maka tak satupun pemeluk agama yang boleh meng-

gunakannya untuk kegiatan yang bersifat intern keagamaan.

3. Upaya-Upaya Memelihara Perdamaian

a. Dari Kultural ke Struktural

Sebelum tahun 1994, kegiatan-kegiatan keagamaan dilaksanakan sendiri-sendiri oleh masing-masing pemeluk agama. Umat Islam mengadakan pengajian atau Syawalan sesama pemeluk agama Islam. Umat Kristen dan Katolik mengadakan kegiatan masing-masing juga, seperti Natal Bersama, tetapi belum melibatkan umat di luar agamanya. Peran umat di luar agamanya, hanya sebatas memberi ‘izin’ atau dengan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan kata lain, toleransi sebetulnya sudah ada di lingkungan Klitren sejak lama.

Akan tetapi, sejak tahun 1994, mulailah digagas kegiatan-kegiatan yang mulai melibatkan pemeluk agama lain dalam sebuah kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan di luar penganutnya. Sejak tahun tersebut, muncul kesadaran untuk saling membantu ketika salah satu pemeluk agama melakukan ritual atau kegiatan keagamaannya. Tentu saja hal ini tidak berkaitan dengan prosesi inti kegiatan tersebut. Bantuan yang diberikan lebih bersifat bantuan tambahan. Misalnya saja, ketika umat Islam melakukan shalat Idul Fitri, umat non-Muslim memberi bantuan dengan mempersiapkan peralatan yang diperlukan, atau menjaga keamanan lingkungan yang banyak ditinggal warga yang melaksanakan ibadah tersebut.

Menurut Yohanes Utoyo, kegiatan-kegiatan tersebut lebih bersifat kultural, atau lahir dari kesadaran masyarakatnya itu sendiri. Gerakan dan kesadaran kultural tersebut hampir bisa dikatakan jauh dari campur tangan para pemimpin formal. Para pemimpin formal (pejabat pemerintahan) juga lebih sering memosisikan diri dalam situasi yang juga formal.

Kalau upaya pemerintah, dalam hal ini pemerintah kelurahan, untuk mewujudkan kerukunan ini sebenarnya saya menilai masih ku-

rang. Sebab apa, saya melihat kehadiran pemerintah disini hanya ketika kegiatan syawalan.

Meski berdiri di posisi formal, pejabat pemerintah juga memiliki peran yang signifikan, terutama dalam tataran kebijakan. Para pemimpin formal terutama dalam lingkup yang lebih kecil, seperti RT dan RW, melakukan koordinasi satu-sama lainnya berkaitan dengan kebijakan yang melibatkan antar pemeluk agama.

Gagasan untuk menyatukan gerakan kultural menjadi gerakan yang bisa dinaungi secara struktural juga datang dari kalangan tokoh masyarakat yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan. Jika sebelum tahun 1994 kegiatan yang melibatkan antarpemeluk agama berlangsung secara kultural, maka antara tahun 1994-2000-an, mulai dirintis pembentukan sebuah forum yang mewadahi kegiatan-kegiatan tersebut agar lebih terkoordinasi dengan baik. Forum ini diharapkan mampu mengorganisir kegiatan-kegiatan yang tadinya bersifat kultural tersebut agar menjadi lebih tertata. Selain itu forum ini bisa menjadi tempat terjadinya komunikasi antarwarga dan antarpemeluk agama dalam menampung ide-ide dan gagasan yang mungkin tidak atau belum sempat tersalurkan. Dan yang terpenting, forum ini diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang bisa meredakan bahkan mencegah bibit konflik akibat adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat.

b. Lahirnya Forkom

Berawal dari gerakan kultural tersebut, pada bulan Juli 2009 dideklarasikan sebuah forum yang diberi nama Forum Komunikasi (Forkom). Lahirnya Forkom menurut salah satu pendiri dan saat ini menjabat sebagai ketuanya, Kusnandar, memang didasari oleh kesadaran akan adanya potensi konflik akibat adanya perbedaan tersebut, terutama perbedaan keyakinan dan agama.

“Forkom ini, sebenarnya adalah wadah ikatan masyarakat Klitren. Lahir dari inisiatif RW-

RW. Kami, para (ketua) RW, memandang bahwa ada suatu potensi dalam masyarakat klitren, potensi itu adalah perbedaan. Perbedaan ini, jika dimanfaatkan, maka akan menjadi kekuatan yang begitu besar. Namun, jika tidak disikapi dengan benar, maka akan menjadi sumber malapetaka. Sebagai contoh perbedaan agama. Perbedaan agama ini, jika semua orang menyikapinya dengan dewasa, maka yang terjadi adalah keharmonisan hubungan yang saling melindungi dan melengkapi. Namun, jika perbedaan itu dipandang sebagai sesuatu yang memecahkan kita, maka perang saudara akan terjadi...”

Menurut Kusnandar, dalam tataran kegiatan, Forkom mengarah pada semua aspek kehidupan masyarakat. Ia menyebut ada enam aspek yang menjadi fokus kegiatan Forkom, yakni sosial, ekonomi, budaya, pemuda dan olahraga, keamanan, dan kerohanian. Akan tetapi, menurut Kusnandar, fokus utama Forkom adalah manajemen konflik.

“Forkom hadir, untuk mengantisipasi terjadinya konflik-konflik yang berbau keyakinan, dan sebagainya. Jika ada masalah, di Forkom inilah masalah itu ditekan hingga tidak terjadi ledakan konflik.”

Salah satu kegiatan riil Forkom yang berkaitan dengan hal ini adalah, saat terjadi peristiwa ledakan bom di salah satu gereja di Solo, masyarakat non-Nasrani ikut menjalankan jalannya peribadatan yang berlangsung di gereja yang ada di kelurahan ini.

Lahirnya Forkom ini mendapat dukungan bukan hanya dari warga, tetapi dari jajaran pemerintahan yang lebih tinggi. Menurut Kusnandar, jenjang pemerintahan yang lebih tinggi memberi dukungan dalam bentuk aset dan dukungan lainnya. Menurutnya, pemerintah tentu saja sangat berterimakasih akan adanya Forkom ini, karena dengan keberadaannya, tugas pemerintah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat ikut terbantu.

Dukungan lain, juga hadir dari kalangan pemuka agama yang ada di lingkungan ini. Bahkan menurut Yohanes Utoyo, pemuka agama Katholik, peran tokoh agama adalah bentuk dukungan yang paling kuat, di samping pejabat pemerintahan setingkat RT dan RW. Menurutnya, tanpa dukungan tokoh agama, Forkom ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ia memberi contoh, selain acara Syawalan yang mendapat bantuan penyelenggaraan dari pemeluk agama non-Muslim, ada juga kejadian yang ia anggap sangat menarik, membanggakan, sekaligus mengharukan.

“Di RW 03, tambah unik lagi. ketika hari Natal, yang ke sana-kemari mengajak seluruh warga, entah Katholik, Protestan, bahkan Muslim, untuk ikut merayakan Natal bukan pendeta ataupun siapa, justru ustaz-nya yang mengajak masyarakat.”

Contoh lain yang tak kalah menariknya adalah, saat ada orang meninggal, tak peduli agamanya apa, semua orang akan berkumpul untuk menyatakan dukacita dan memberi bantuan yang diperlukan.

“Bapak-bapak yang berkopiab berbaur dengan yang tidak berkopiab, ibu-ibu yang berkerudung bergabung dengan ibu-ibu yang tidak berkerudung...”

4. Kuasa Perempuan

Fokus utama dalam penelitian ini adalah perempuan. Lalu di mana peran perempuan dan sejauh mana kuasa perempuan atas upaya-upaya menjaga perdamaian di lingkungan ini?

Dalam seluruh rangkaian kegiatan dan proses ini, perempuan justru menempati porsi yang sangat besar dalam hal pelaksanaan dan upaya-upaya pemeliharaan. Jika peran kaum laki-laki seperti telah dijelaskan di atas lebih pada gerakan rintisan, membuka komunikasi, melepas sekat perbedaan, dan mendorong secara formal, kaum perempuan berperan pen-

ting dalam memelihara rintisan tersebut dan menjaga kesinambungannya. Hal ini terbukti dari banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan. Diantara kegiatan-kegiatan tersebut ada yang sudah dilakukan secara berkala, terutama yang digerakkan oleh PKK, seperti:

- a. Tanggal 7 setiap bulan: Arisan ibu-ibu PKK tingkat RW
- b. Tanggal 8 setiap bulan: Arisan RT (meliputi 3 RT di setiap RW)
- c. Tanggal 14 setiap bulan: Pengajian Keluarga Sakinah (bagi Muslim)
- d. Tanggal 15: Penimbangan balita di RW
- e. Tanggal 25: Penimbangan balita di puskesmas
- f. Setiap hari Jum'at: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap hari jum'at
- g. Setiap hari Rabu: Pendalaman Iman Katholik
- h. Setiap bulan: Latihan Koor bagi penganut Katholik
- i. Setiap hari Sabtu di akhir bulan: Pengajian Keluarga Sakinah tingkat kelurahan yang dilaksanakan di Balai RW secara bergilir.

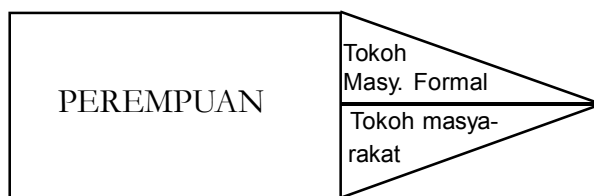
Secara formal, memang ada wadah bagi kaum perempuan dalam menjalankan kegiatan, yakni PKK, akan tetapi, dukungan kegiatan yang nonformal justru jauh lebih kuat di antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan ini. Dalam masyarakat patrilineal seperti di Indonesia, di mana kaum laki-laki mempunyai tugas untuk mencari nafkah sementara perempuan menjaga wilayah keluarga yang menyebabkan posisi perempuan lebih banyak berada di lingkungan rumahnya dan bergaul dengan tetangganya, posisi inilah yang justru sangat strategis dalam manajemen konflik. Konflik seringkali terjadi di kalangan perempuan karena tingginya intensitas pertemuan mereka. Dan konflik juga bisa diredam oleh kekuatan kebersamaan kaum perempuan ini. Oleh karena itu, sekecil apapun bentuk kegiatan kaum perempuan, dampaknya sangat besar

bagi terciptanya kedamaian di lingkungannya.

Menurut Kusnandar dalam gerakan Forkom, tokoh-tokoh perempuan memang tidak banyak mengambil peran, akan tetapi dalam berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di Klitren, perempuan berada di wilayah ‘belakang’ yang kental dengan nuansa kulturalnya.

“Tokoh perempuan memang tidak begitu nampak dalam gerakan-gerakannya emacam itu (Forkom, dll) hanya saja, perempuan inilah yang memiliki kontrol total dalam dimensi kultural. Sebagai contoh, segala macam ‘pekerjaan belakang’. Dalam setiap acara, semua ibu-ibu berkumpul dan saling gotong royong mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dapur dan semacamnya.”

Interaksi di wilayah kultural inilah yang makin memperkuat posisi perempuan dalam upaya menjaga kedamaian. Oleh karena itu, posisi perempuan dalam upaya menjaga dan menciptakan perdamaian, bisa digambarkan dalam skema berikut:



Skema di atas menunjukkan bahwa, meski terlihat berada di bagian ‘belakang’ dalam tataran pengambilan keputusan, tetapi kaum perempuan justru berada di bagian depan dalam tataran pemeliharaan kedamaian tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan riil yang justru dilakukan oleh kaum perempuan. Kegiatan-kegiatan ini justru menjadi garda depan yang sangat krusial, karena berlangsung hampir secara simultan dan berkala.

I. Simpulan

Warga Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta sangat me-

nyadari bahwa keragaman latar belakang agama, sosial dan budaya yang terdapat di dalam lingkungannya adalah sebuah potensi besar. Potensi besar itu bisa menjadi bencana jika tidak dikelola dengan baik, misalnya dengan memunculkan gesekan yang akhirnya berujung pada konflik. Sebaliknya, perbedaan tersebut dianggap sebagai sebuah potensi yang baik dan dikelola dengan baik pula, maka perbedaan itu justru akan menjadi kekuatan yang mempersatukan dan menciptakan suasana harmonis dalam lingkungan sosial mereka.

Kesadaran untuk mengelola potensi tersebut ke arah yang baik dengan prinsip manajemen konflik, pada dasarnya sudah ada di Klitren dan berlangsung dalam tataran kultural, atau dalam praktik kehidupan keseharian, misalnya saling membantu antarumat beragama. Tataran kultural yang sudah cukup kuat tersebut, dirasakan akan lebih kuat jika kemudian dibawa ke dalam tataran yang lebih formal. Karena itulah kemudian lahir Forum Komunikasi (Forkom) yang tujuan utamanya adalah mengorganisir dan melakukan manajemen konflik dengan kegiatan yang nyata dalam enam aspek kehidupan kemasyarakatan, yakni sosial, ekonomi, budaya, pemuda dan olahraga, keamanan, dan kerohanian.

Dalam tataran formal, seperti gerakan yang kemudian melahirkan Forkom tersebut peran penting diambil oleh kaum laki-laki yang memang –disadari atau tidak, disengaja atau tidak—menguasai pos-pos kepemimpinan, baik pimpinan formal (RT, RW), pimpinan agama, dan pimpinan non formal (tokoh pemuda, dan lain-lain). Sedangkan kaum perempuan, seperti diakui, mengambil posisi di ‘belakang’ yang justru menguatkan gerakan tersebut dalam tataran nonformal atau gerakan yang lebih bersifat kultural.

Kegiatan-kegiatan kaum perempuan yang lebih bersifat kultural tersebut, justru menjadi penopang dan menjadi kekuatan utama dalam proses menciptakan dan menjaga kedamaian antarumat beragama. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan –baik yang ber-

kala maupun insidental—yang dilakukan oleh kaum perempuan justru terjadi dan berlangsung dengan lebih intens, sehingga mampu menjadi penopang utama dari gerakan-gerakan penciptaan suasana damai dan harmonis yang dirintis oleh laki-laki.

Dengan demikian, meski terlihat seperti berada di ‘belakang’ posisi dan kuasa perempuan dalam penciptaan situasi damai dan harmonis ini, menjadi bagian yang penting, bahkan menjadi yang terpenting karena justru berada di garda depan kehidupan sosial masyarakat di lingkungan Kelurahan Klitren. ■

DAFTAR PUSTAKA

- Boserup, E, 1970. *Women's Role in Economic Development*, London: George Allen and Unwin.
- Ecip, Sinansari S (1999), *Menyulut Ambon, Kronologi Merambatnya Berbagai Kerusuhan Lintas Wilayah di Indonesia*, Bandung: Mizan
- Geertz, Hildred, 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Press.
- Giring, 2004. *Madura di Mata Dayak: dari Konflik ke Rekonsiliasi*, Yogyakarta: Galang Press.
- Lombard, D, 1990. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lubis, Amany, 2002. “Gender Gap in Leadership Roles in the Educational and Political Fields”, dalam M. Atho Mudzhar, et al (ed), *Women in Indonesian Society: Acces, Empowerment, and Opportunity*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, hal. 43-63.
- Maharto-Tjirosubono, 1998. “Kedudukan Wanita dalam Kebudayaan Jawa Dulu, Kini dan Esok”, dalam Binar, *Wacana Wanita dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Yogyakarta: Pustaka Cidesindo.
- Mosse, J.C, 1996. *Gender & Pembangunan* (Terjemahan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudiyono et al., 2000. *Konflik Sosial di Kalimantan Barat: Perilaku Kekerasan antara Etnik Madura-Dayak dan Madura- Melayu*, Pontianak: Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura.
- Reeves, S.P. 1981. *Female Power and Male Dominan*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sacks, K, 1974. “Engels Revisited: Women, the Organization of Production, and Private Property” dalam M.Z. Rosaldo dan L. Lamphere (ed.), *Women, Culture, and Society*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Saptari, R, Holsner, B, 1997. *Wanita kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Wanita*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Stivens, M, 1991. *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*. Austria: Aristoc Press.
- Sullivan, N, 1991. “Gender and Politics in Indonesia”. Dalam Maila Stivens. *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*. Australia: Aristoc Press.
- Usman, S, 1998. “Keluarga dan Perubahan Sosial” dalam Binar, *Wacana Wanita dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Yogyakarta: Pustaka Cidesindo.

